**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR**

1. **Tinjauan Pustaka**
2. **Konsep Pendidikan Kecakapan Hidup**
3. **Pengertian Pendidikan Kecakapan Hidup**

Terdapat perbedaan pendapat tentang pengertian pendidikan kecakapan hidup atau *life skills,* namun esensinya tetap sama. Menurut Brolin (Asmani 2009:29) kecakapan hidup atau *life skills* adalah “kontinum pengetahuan dan kemampuan yang diperlukan oleh seseorang agar menjadi independen dalam kehidupan”. Sedangkan menurut Malik Fajar (Jamal, 2009:29) mengatakan *life skills* adalah “kecakapan yang dibutuhkkan untuk bekerja selain kecakapan dalam bidang akademik”. Ada juga pendapat dari Cherly (2000) mengemukakan bahwa pendidikan kecakapan hidup merupakan salah satu kegiatan pemberdayaan yang merupakan proses sosial yang multidimensional untuk menolong masyarakat memperoleh kontrol kehidupan sendiri. Dalam kaitan itu, ia menjelaskan bahwa kecakapan hidup itu meliputi tiga aspek penting yaitu:

1. Kecakapan hidup itu berupa kegiatan pendidikan yang terkait dengan bidang sosial, psikologi, ekonomi dan bidang lainnya.
2. Kecakapan hidup sebagai kegiatan sosial dimaksudkan sebagai program yang ditujukan pada masyarakat dengan memperhatikan tingkat sosial seperti individu, kelompok, dan masyarakat secara luas.
3. Kecakapan hidup sebagai interaksi (hubungan) yakni terjadinya kontak dengan orang, badan atau lembaga yang menyiapkan program pendidikan.

Asmani (2009:30) mendefinisikan Life skills sebagai “pendidikan yang memberikan bekal dasar dan latihan yang dilakukan secara benar kepada peserta didik tentang nilai-nilai kehidupan yang dibutuhkan dan berguna bagi perkembangan kehidupan peserta didik”. Menurut Brolin (Depdiknas, 2004) *life skills* adalah

interaksi berbagai pengetahuan dan kecakapan yang sangat penting dimiliki oleh seseorang sehingga mereka dapat hidup mandiri”. Selanjutnya Brolin mengelompokkan *life skills* ke dalam tiga kelompok kecakapan yaitu: kecakapan hidup sehari-hari ( *daily living skill*), kecakapan hidup pribadi/sosial (*personal social skill*), dan kecakapan hidup bekerja (*Occupational skill***)**.

Kecakapan hidup sehari-hari (*daily living skill*), antara lain meliputi: pengelolaan kebutuhan pribadi, pengelolaan keuangan pribadi, pengelolaan rumah pribadi, kesadaran kesehatan, kesadaran keamanan, pengelolaan makanan bergizi, pengelolaan pakaian, kesadaran pribadi sebagai warga negara, pengelolaan waktu luang, rekreasi, dan kesadaran lingkungan.

Kecakapan hidup sosial/pribadi (*personal/social skill)*, antara lain: kesadaran diri (minat, bakat, sikap, kecakapan), percaya diri, komunikasi dengan orang lain, tenggang rasa dan kepedulian pada sesama, hubungan antar personal, pemahaman dan pemecahan masalah, menemukan dan mengembangkan kebiasaan positif, kemandirian dan kepemimpinan.

Sedangkan yang dimaksud dengan kecakapan hidup bekerja (*Occupation Skill*), meliputi: kecakapan memilih pekerjaan, perencanaan kerja, persiapan keterampilan kerja, penguasaan kompetensi, menjalankan suatu profesi, kesadaran untuk menguasai berbagai keterampilan, kemampuan menguasai dan menerapkan teknologi, merancang dan melaksanakan proses pekerjaan, dan menghasilkan produk barang dan jasa.

WHO (Depdiknas, 2004:7**)** memberikan pengertian bahwa Kecakapan hidup adalah “berbagai keterampilan/ kemampuan untuk dapat beradaptasi dan berprilaku positif, yang memungkinkan seseorang mampu menghadapi berbagai persoalan dan tantangan dalam hidupnya sehari – hari secara efektif”.

WHO (Depdiknas, 2004:7**)** mengelompokkan kecakapan hidup ke dalam lima kelompok yaitu: “(1) kecakapan mengenal diri (*self awareness)* atau kecakapan pribadi (*personal skill*), (2) kecakapan sosial ( *social skill*), (3) kecakapan berpikir (*thinking skill)*, (4) kecakapan akademik ( *academic skill)*, dan (5) kecakapan kejuruan ( *vocational skill*)”.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa hakikat pendidikan kecakapan hidup dalam pendidikan nonformal adalah merupakan upaya untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan dan kemampuan yang memungkinkan warga belajar dapat hidup mandiri.

1. **Program Pendidikan Kecakapan Hidup**

Pendidikan kecakapan hidup pada dasarnya merupakan suatu upaya pendidikan untuk meningkatkan kecakapan hidup setiap warga negara. Pengertian kecakapan hidup adalah kecakapan yang dimiliki oleh seseorang untuk berani menghadapi problema hidup dan kehidupan dengan wajar tanpa merasa tertekan, kemudian secara proaktif dan kreatif mencari serta menemukan solusi, sehingga akhirnya mampu mengatasinya.

Depdiknas (Anwar, 2004:28) Secara operasional, program kecakapan hidup dalam pendidikan nonformal dipilah menjadi empat jenis yaitu “(1) Kecakapan pribadi, (2) kecakapan sosial, (3) Kecakapan akademik, (4) Kecakapan vokasional”. Hal tersebut diuraikan sebagai berikut:

1. Kecakapan pribadi (*Personal skills*), yang mencakup kecakapan mengenal diri sendiri, kecakapan berpikir rasional, dan percaya diri.
2. Kecakapan sosial (*social skills*), seperti kecakapan melakukan kerjasama, bertenggang rasa, dan tanggungjawab sosial.
3. Kecakapan akademik (*academic skills*), seperti kecakapan dalam berpikir secara ilmiah, melakukan penelitian dan percobaan-percobaan dengan pendekatan ilmiah.
4. Kecakapan vokasional (*vocational skills*), adalah kecakapan yang dikaitkan dengan bidang pekerjaan tertentu yang terdapat di masyarakat, seperti di bidang jasa (perbengkelan, jahit menjahit), dan produksi barang tertentu (peternakan, pertanian, perkebunan).

Keempat jenis kecakapan hidup di atas, dilandasi oleh kecakapan spiritual, yakni: keimanan, ketaqwaan, moral, etika dan budi luhur sebagai salah satu pengamalan dari sila pertama Pancasila. Dengan demikian, pendidikan kecakapan hidup diarahkan pada pembentukan manusia yang berakhlak mulia, cerdas, terampil, sehat, mandiri serta memiliki produktivitas dan etos kerja yang tinggi.

Penyelenggaraan pendidikan kecakapan hidup pada satuan dan program pendidikan nonformal, utamanya dalam rangka pengentasan kemiskinan dan penanggulangan pengangguran lebih ditekankan pada upaya pembelajaran yang dapat memberikan penghasilan (*learning to earning*).

Berdasarkan Depdiknas (2004) penyelenggaraan pendidikan kecakapan hidup dengan pendekatan *broad based education (BBE)* pada jalur pendidikan nonformal bahwa:

(1) Kemampuan membaca dan menulis secara fungsional, baik dalam bahasa Indonesia maupun salah satu bahasa asing (Inggris, Arab Mandarin, Jepang, dan lainnya), (2) Kemampuan merumuskan dan memecahkan masalah yang dihadapi melalui proses pembelajaran berpikir kritis dan ilmiah, penelitian, penemuan dan penciptaan, (3) Kemampuan menghitung dengan atau tanpa bantuan teknologi guna mendukung kedua kemampuan di atas, (4) Kemampuan memanfaatkan keanekaragaman teknologi diberbagai lapangan kehidupan (pertanian, perikanan, peternakan, kerajinan, kerumahtanggaan, kesehatan, komunikasi informasi, manufaktur dan industri, perdagangan, kesenian dan olahraga), (5) Kemampuan mengelola sumber daya alam, sosial budaya dan lingkungan, (6) Kemampuan bekerja dalam tim baik sektor formal maupun informal, (7) Kemampuan memahami diri sendiri, orang lain dan lingkungannya, (8) Kemampuan berusaha secara terus menerus dan menjadi manusia belajar dan pembelajaran, (9) Kemampuan mengintegrasikan pendidikan dan pembelajaran dengan etika sosioreligius bangsa berdasarkan nilai – nilai Pancasila.

Baik dari definisi secara umum maupun secara operasional, kita dapat menyimak bahwa, pendidikan kecakapan hidup itu merupakan suatu konsep yang merupakan upaya untuk memperkuat posisi seseorang melalui pertumbuhan kesadaran dan kemampuan individu yang bersangkutan untuk mengidentifikasi persoalan yang dihadapi dan menumbuhkan langkah untuk mengatasinya.

Secara umum, pendidikan kecakapan hidup yang diselenggarakan melalui jalur pendidikan nonformal bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan warga belajar di bidang pekerjaan/usaha tertentu sesuai dengan bakat, minat, perkembangan fisik dan jiwanya, serta potensi lingkungannya, sehingga mereka memiliki bekal kemampuan untuk bekerja atau berusaha mandiri yang dapat dijadikan bekal untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Sedangkan secara khusus pendidikan kecakapan hidup ditujukan pada upaya memberikan pelayanan pendidikan kecakapan hidup kepada warga belajar agar:

1. Memiliki pengetahuan, sikap dan keterampilan yang dibutuhkan dalam memasuki dunia kerja baik bekerja mandiri (wirausaha) dan atau bekerja pada suatu perusahaan produksi/jasa dengan penghasilan yang semakin layak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
2. Memiliki motivasi dan etos kerja yang tinggi serta dapat menghasilkan karya-karya yang unggul dan mampu bersaing di pasar global.
3. Memiliki kesadaran yang tinggi tentang pentingnya pendidikan untuk dirinya sendiri maupun anggota keluarganya.
4. Mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan sepanjang hayat (*life long education)* dalam rangka mewujudkan keadilan pendidikan di setiap lapisan masyarakat
5. **Manfaat Program Pendidikan Kecakapan Hidup**

Penyelenggaraan pendidikan kecakapan hidup (*life skills*) yang diarahkan pada upaya pengentasan kemiskinan dan upaya memecahkan masalah pengangguran, oleh karena itu pemilihan keterampilan yang akan dipelajari oleh warga belajar didasarkan atas kebutuhan masyarakat, potensi lokal dan kebutuhan pasar, sehingga diharapkan akan memberikan manfaat yang positif bagi warga belajar, masyarakat sekitar dan pemerintah.

Program pendidikan kecakapan hidup memberi manfaat pada semua pihak, baik pada warga belajar, masyarakat serta pemerintah. Manfaat pada Warga belajar yang mengikuti program pendidikan kecakapan hidup akan memperoleh manfaat antara lain : (1) memiliki pengetahuan, sikap, keterampilan dan kemampuan sebagai bekal untuk berusaha sendiri dan atau bekerja pada perusahaan yang terkait. (2) Memiliki penghasilan yang dapat digunakan untuk menghidupi diri sendiri dan keluarganya. (3) Memiliki penghasilan yang dapat digunakan untuk meningkatkan profesionalisme dan atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, (4) Memiliki pengetahuan, sikap, keterampilan dan kemampuan bermanfaat yang dapat ditularkan kepada sesamanya.

Manfaat bagi masyarakat dapat berupa: (1) pengangguran berkurang, (2) tumbuhnya aneka mata pencaharian baru yang diusahakan oleh masyarakat sekitar, (3) berkurangnya kesenjangan sosial, (4) keamanan masyarakat membaik. Sedangkan pada pemerintah, manfaat dapat berupa: (1). meningkatnya sumber daya manusia, (2). produktivitas bangsa meningkat, (3). mencegah urbanisasi, (4) tumbuhnya kegiatan usaha ekonomi masyarakat, (5). mencegah kerawanan sosial.

Kegiatan pendidikan kecakapan hidup banyak dilakukan ditengah-tengah masyarakat kita. Sehingga perlu kita mengenal ciri program tersebut. Berdasarkan Depdiknas (Anwar, 2004) bahwa Secara khusus ciri-ciri pembelajaran program pendidikan kecakapan hidup adalah :

(1) terjadinya proses identifikasi kebutuhan belajar, (2) terjadinya proses penyadaran untuk belajar bersama, (3) terjadinya keselarasan belajar untuk mengembangkan diri, belajar, usaha mandiri, usaha bersama, (4) terjadinya proses penguasaan kecakapan personal, sosial, vokasional, akademik, manajerial, kewirausahaan, (5) terjadinya proses pemberian pengalaman dalam melakukan pekerjaan dengan benar, menghasilkan produk bermutu, (6) terjadi proses interaksi saling belajar dari ahli, (7) terjadi proses penilaian kompetensi, (8) terjadi pendampingan teknis untuk bekerja atau membentuk usaha bersama.

1. **Konsep Lembaga Kursus dan Pelatihan**

Lembaga kursus dan pelatihan merupakan salah satu wadah dalam melaksanakan program-program pendidikan kecakapan hidup. Dalam penjelasan pada pasal 26 ayat 5 Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, ditegaskan bahwa:

Kursus dan pelatihan adalah bentuk pendidikan berkelanjutan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik dengan penekanan pada penguasaan keterampilan, standar kompetensi, pengembangan sikap kewirausahaan serta pengembangan kepribadian professional.

Lembaga Kursus dan Pelatihan menjadi mitra yang dipercayakan oleh Direktorat Kursus dan Pelatihan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam menyelenggarakan program kursus dan pelatihan bagi masyarakat yang kurang berdaya, namun belum dapat memperlihatkan hasil yang maksimal dalam perencanaan, pelaksanaan dan tindak lanjut hasil pelatihan. Undang-undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 26 ayat 5 ditegaskan bahwa

kursus dan pelatihan diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Hal ini terkait dengan kualifikasi dan kompetensi penyelenggara dalam mengelola program PKH, pengelolaan proses pembelajaran oleh instruktur/sumber belajar dan kurangnya keterlibatan unsur-unsur masyarakat dalam penyelenggaraannya.

Dilihat dari kurikulum pembelajaran, Situmorang (2010:47) mengatakan bahwa:

Secara khusus, kurikulum dan bahan ajar belum sepenuhnya berbasis kompetensi. Standar isi hanya mengacu pada kompetensi professional/ vokasional saja dengan proporsi teori seimbang dengan praktik. Muatan kurikulum tentang kompetensi personal, kompetensi sosial, dan kompetensi akademik belum tampak secara nyata. Kegiatan pelatihan dan PKH hanya bertumpu pada praktik dan penguasaan keterampilan yang berkenaan dengan jenis kompetensi professional/ vocational, sehingga hanya bersifat keterampilan psikomotorik, belum menumbuhkan kompetensi personal, kompetensi sosial, dan kompetensi akademik, yang akan menunjang pada kegigihan, ketekunan, kejujuran, etos kerja, tanggungjawab, kerjasama, sikap terbuka, percaya diri dan sikap kemandirian. Belum adanya bahan ajar untuk mengembangkan watak dan karakter kemandirian serta sikap kewirausahaan yang disusun oleh pihak LKP. Kurikulum yang ada belum menyentuh pengembangan watak dan pendidikan karakter.

Dalam perencanaan penyelenggaraan program pendidikan kecakapan hidup yang berorientasi pada keterampilan, dibutuhkan sumber daya manusia pada Lembaga Kursus dan Pelatihan yang memiliki pengetahuan dan keterampilan mengidentifikasi kebutuhan warga masyarakat. Identifikasi kebutuhan adalah sesuatu cara yang sistematis untuk menentukan prioritas kebutuhan sebagai masukan dalam pengambilan alternatif kebijakan tentang pelaksanaan program PKH. Keputusan diambil pada tahap perencanaan sebagai persiapan penyelenggaraan suatu program yang didasarkan atas layak tidaknya kondisi masyarakat, namun pada kenyataannya sangat jarang dijumpai lembaga penyelenggara pendidikan nonformal, terutama pada LKP yang melakukan analisis kebutuhan belajar secara sistematis. Demikian pula tentang analisis potensi kemitraan dengan unsur-unsur terkait, baik di dalam masyarakat itu sendiri maupun unsur pemerintah Mengingat LKP memiliki keterbatasan dalam hal fasilitas pendidikan dan keterbatasan SDM, maka dibutuhkan kemitraan atau sinergi yang dapat membantu pencapaian tujuan penyelenggaraan Pendidikan Kecakapan Hidup

Jika sinergi atau kemitraan terjalin antara Lembaga Kursus dan Pelatihan dengan unsur Dunia Usaha dan Industri (DUDI) yang dikelola oleh pemerintah atau swasta sejalan dengan kebutuhan belajar masyarakat berdasarkan hasil identifikasi, maka program PKH yang dilaksanakan akan berdampak pada hasil pembelajaran yang maksimal sesuai dengan tujuan pendidikan kecakapan hidup.. Namun LKP yang melaksanakan program PKH selama ini belum dapat memperlihatkan hasil maksimal. Hal ini sejalan dengan pendapat Sujanto (2013: 71), bahwa:

Lembaga Kursus dan Pelatihan selama ini dirasakan kurang optimal dalam membantu mengurangi jumlah pengangguran. Hal ini dikarenakan program pelatihan yang diadakan kurang disesuaikan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri (DUDI) sehingga lulusan LKP belum memiliki kemampuan dan kualitas untuk terjun langsung ke dunia usaha dan dunia industri.

Mengingat kondisi Lembaga Kursus dan Pelatihan di Kota Makassar yang sangat bervariasi dilihat dari jenis program kursus, fasilitas lembaga, dan sumber daya manusianya, maka perlu dilakukan studi untuk mengetahui tentang langkah-langkah penyelenggaraan program PKH, terutama cara mengidentifikasi kebutuhan belajar masyarakat, perencanaan program, pengembangan kurikulum pembelajaran, proses pembelajaran, kemitraan dan evaluasi penyelenggaraan program pendidikan kecakapan hidup.

1. **Penyelenggaraan Pendidikan Kecakapan Hidup pada Lembaga Kursus dan Pelatihan**

Penyelenggaraan pendidikan kecakapan hidup pada satuan dan program pendidikan nonformal, utamanya dalam rangka pengentasan kemiskinan dan penanggulangan pengangguran lebih ditekankan pada upaya pembelajaran yang dapat memberikan penghasilan.

Suharto (2010: 79) menjelaskan bahwa “dalam pelaksanaan Perencanaan sosial maka akan ada tahap-tahap yang dilaksanakan karena setiap perencanaan sosial dibuat dengan mengikuti tahapan atau siklus tertentu. Tahapan tersebut biasanya berbeda-beda tergantung pada jenis perencanaan, tujuan perencanaan dan konteks perencanaan”.

* + 1. **Perencanaan**

Dalam melaksanakan kegiatan/program tentunya harus ada tahap persiapan/ perencanaan. Suharto (2010: 73), menjelaskan bahwa “perencanaan program sangat tergantung pada asumsi dan tujuan dari perencanaan sosial itu sendiri. Dalam tahap perencanaan terdapat dua bagian yaitu identifikasi kebutuhan dan desain penyelenggaraan”. Selanjutnya diuraikan sebagai berikut:

* + - 1. Identifikasi Kebutuhan PKH.

Manusia sebagai mahluk ber-Tuhan, individual, social, dan unik. Seorang mungkin mempunyai kebutuhan ya ng sama atau bebeda dengan kebutuhan orang lain pada suatu ruang dan waktu tertentu. Kebutuhan yang berkaitan dengan upaya manusia untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan disebut kebutuhan hidup manusia. Abraham Maslow (Sudjana 2010:167) menjelaskan lima tingkatan kebutuhan manusia yang harus dan dapat dipenuhi, digambarkan sebagai beriut:

Gambar 2.1. Tingkatan Kebutuhan Hidup Manusia

Keterangan:

5 = kebutuhan aktualisasi diri *(self-actualization need)*

4 = kebutuhan penghargaan *(esteem need)*

3 = kebutuhan social *(social need)*

2 = kebutuhan rasa aman *(safety need)*

1 = kebutuhan fisiologis/dasar *(fhysiological need)*

Berdasarkan lima tingkatan kebutuhan tersebut dapat dikemukakan bahwa kebutuhan dasar merupakan kebutuhan yang paling utama dalam kehidupan manusia. Kebutuhan ini memberikan motivasi yang kuat bagi setiap orang dalam mempertahankan dan melanjutkan kehidupannya. Kebutuhan akan pendidikan (education need) berkaitan erat dengan kebutuhan manusia.

Lebih lanjut Sudjana (2010: 184) mengatakan bahwa “Kebutuhan fisiologis (jasmaniah) dan kebutuhan psikologis (rohaniah), yang dapat menjadi dasar bagi seseorang, kelompok atau masyarakat untuk menyatakan kebutuhan pendidikan yang dirasakan oleh mereka”.

Kebutuhan pendidikan dikemukakan oleh(Knowless. 1977: 85) bahwa *“An-education need is something a person ought to learn for his own good, for the good of an organization, or for the good of society”*.

Kebutuhan pendidikan adalah sesuatu yang harus dipelajari oleh sesorang guna kemajuan kehidupan bagi dirinya, lembaga yang ia masuki, dan atau untuk kemajuan masyarakat.

Dalam hubungannya dengan kemampuan untuk melaksanakan tugas atau pekerjaan, lebih lanjut Knowless mengatakan bahwa kebutuhan pendidikan *“is the gap between his persent level of competencies and a higher level required for effective perfomance as defined by himselp, his organization, or his society”*. Hal ini diartikan bahwa kebutuhan pendidikan *(education need)* adalah jarak (perbedaan) antara kompetensi (kemampuan) yang dimiliki oleh seseorang pada saat ini dengan kompetensi (kemampuan) lebih tinggi yang diisyaratkan dan harus dikuasai oleh orang itu sesuai dengan keinginan dirinya, lembaga yang ia masuki, atau masyarakatnya. Dengan kata lain bahwa tingkat kemampuan yang diinginkan atau yang harus dimiliki itu didasarkan atas kebutuhan yang dirasakan dan dinyatakan oleh dirinya, lembaga/organisasi yang ia masuki, atau masyarakat yang menjadi layanan kegiatan orang tersebut.

Kebutuhan pendidikan, yaitu perbedaan antara kemampuan yang diinginkan dengan kemampuan yang dimiliki, perlu diterjemahkan menjadi kebutuhan belajar *(learning need)*, hal ini disebabkan karena; *pertama,* bahwa kebutuhan pendidikan itu berkesinambungan. Kedua, dalam menentukan program pendidikan yang dapat memenuhi kebutuhan pendidikan, perlu didahului dengan identifikasi kebutuhan belajar.

Kebutuhan belajar perlu diidentifikasi melalui pendekatan perorangan, identifikasi dilakukan dengan menggunakan instrument yang cocok sehingga mampu mengungkap informasi yang dinyatakan oleh setiap individu yang merasakan kebutuhan belajar. Instrumen identifikasi tersebut, antara lain; pedoman wawancara, angket, SKBM (Sumber dan Kebutuhan Belajar Masyarakat).

Kebutuhan belajar yang dirasakan sama dengan individu yang satu dengan yang lainnya dalam suatu kelompok wilayah sasaran , disebut kebutuhan belajar kelompok. Kebutuhan belajar kelompok pada umumnya dapat dipenuhi dengan kegiatan belajar bersama atau kegiatan belajar kelompok. Sasaran kelompok belajar inilah yang menjadi dasar penyelenggaraan program pendidikan kecakapan hidup, terutama yang diprogramkan oleh Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal (PAUDNI) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

2) Desain Penyelenggaraan

Proses untuk mendesain pelatihan dapat dilakukan melalui lima langkah Menurut Dick & Carey yaitu “a) kesadaran, b) pengertian, c) penerimaan, d) komitmen, e) pengembangan”. Selanjutnya diuraikan sebagai berikut :

a) Kesadaran*.* Di dalam hal ini segala pihak diberikan informasi yang jelas bahwa perubahan memang diperlukan, dan lebih spesifik lagi, apa saja yang memerlukan perubahan.

b) Pengertian *(Understanding).* Mengembangkan pengertian bahwa perubahan memang diperlukan dan bagaimana perubahan itu akan dicapai.

c) Penerimaan *(Acceptance).* Berdasarkan pengertian tersebut di atas maka berbagai pihak menyetujui bahwa perubahan itu memang perlu.

d) Komitmen*.* Dengan adanya penerimaan bahwa perubahan itu perlu, maka berbagai pihak memberikan komitmen dalam arti bahwa mereka menunjang dan ambil bagian di dalam proses perubahan tersebut.

e) Pengembangan*.* Mengembangkan perubahan-perubahan yang dengan memberikan contoh dan non-contoh.

Lebih lanjut, dikatakan bahwa untuk masing-masing aktivitas pada masing-masing langkah atau urutan pembelajaran, diikuti dengan pemilihan metode, media, dan alokasi waktu yang sesuai dengan kondisi pembelajaran (karakteristik tujuan instruksional, karakteristik peserta belajar, dan kendala). Untuk pelatihan keterampilan psikomotorik, strategi pembelajarannya dimulai dari pembelajaran teori, kemudian dilanjutkan dengan pembelajaran keterampilan psikomotoriknya melalui latihan. Bentuk latihan disarankan melakukan praktik baik secara simulasi mapun secara nyata dan akan lebih baik bila dilanjutkan dalam bentuk magang.

**b.Pelaksanaan Pembelajaran**

Suharto (2012: 80) menjelaskan “pelaksanaan adalah proses dari langkah-langkah yang dilakukan dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat”. Langkah-langkah yang dilakukan dalam pelaksanaan merupakan implementasi dari aksi sosial yang prakteknya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat dalam penanganan masalah soial.

Pelaksanaan merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu badan atau wadah secara berencana, teratur dan terarah guna mencapai tujuan yang diharapkan. menurut Westa (1985 : 17) Pengertian Implementasi atau pelaksanaan adalah:

Implementasi atau pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan.

Pelaksanaan yang dimaksud dalam penyelenggaran pembelajaran pendidikan keakapan hidup adalah yang berkaitan dengan kurikulum pembelajaran, silabus dan rencana persiapan pembelajaran.

1. Kurikulum

Strategi pelatihan itu berkenaan dengan paling sedikit lima kegiatan, yakni (1) penyiapan bahan ajar, penyajian bahan ajar dengan metode dan teknik tertentu, penggunaan media pembelajaran, pengelolaan proses belajar dan diklat, serta penggunaan evaluasi. Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 36, ayat 2 dinyatakan bahwa:

Kurikulum pada semua jenjang dan jenis diklat dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan diklat, potensi daerah, dan peserta latih. Kurikulum merupakan perangkat standar program diklat yang dapat mengantar peserta latih memiliki kompetensi dalam berbagai bidang kehidupan yang dikuasainya. Berorientasi pada: (1) hasil dan implikasi yang diharapkan muncul pada diri peserta latih melalui serangkaian pengalaman belajar dan (2) keberagaman yang dapat dimanifestasikan sesuai dengan kebutuhannya.

Hal ini menjelaskan ciri-ciri kurikulum berbasis kompetensi yang menekankan pada ketercapaian kompetensi peserta latih, baik secara individual maupun klasikal; berorientasi pada hasil dan keberagaman; penyampaian dalam pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi; sumber belajar bukan hanya pelatih/instruktur, tetapi juga sumber belajar yang lainnya yang memenuhi unsure edukatif; penilaian menekankan pada proses dan hasil dalam upaya penguasaan atau pencapaian suatu kompetensi.

Adapun ciri-ciri kurikulum berbasis pada pekerjaan, sebagai berikut: (a) Menekankan pada ketercapaian kompetensi peserta latih, baik secara individual maupun klasikal, (b) Berorientasi pada hasil belajar dan keberagaman, (c) Penyampaian dalam pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi, (d) Sumber belajar bukan hanya pelatih atau instruktur, tetapi juga sumber belajar yang lainnya yang memenuhi unsur edukatif, dan (e) Penilaian menekankan pada proses dan hasil dalam upaya penguasaan atau pencapaian suatu komponen.

1. Silabus

Berdasarkan pengertian dasar silabus ialah perluasan akan standar kompetensi serta kompetensi dasar yang masuk ke dalam materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran dan indicator pencapaian untuk penilaian hasil belajar. Bisa pula dikaitkan dengan rencana pembelajaran pada sembuah mata pelajaran yang wajib meliputi komponen-komponen penting, mulai dari standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indicator, penilaian, alokasi waktu hingga, sumber belajar.

Yulaelawati (2004:123) mejelaskanbahwa:

silabus adalah seperangkat rencana dan pelaksanaan pengaturan pembelajaran dan penilaian yang disusun secara sistematis mencakup komponen yang saling terkait untuk mencapai penguasaan kompetensi dasar.

Silabus sering kali dipakai sebagai pedoman atau sumber utama untuk mengembangkan pembelajaran yang lengkap, mulai dari penyusunan ,rencana pembelajaran, mengatur pembelajaran hingga mengembangkan system penilaian hasil belajar. Pada intinya, silabus dipakai sebagai pedoman para guru untuk menyusun rencana dan menjalankan program pembelajaran.

1. Rancangan Persiapan Pembelajaran

Pelaksanaan Pembelajaran yang diartikan sebagai suatu rencana yang memperlihatka prosedur serta pengorganisasian pembelajaran demi tercapainya kompetensi dasar yang diatur menurut standar isidan dijelaskan sesuai silabus, bisa dikatakan bahwa RPP ialah persiapan yang harus diterapkan oleh guru sebelum memulai proses mengajar, baik tertulis atau mental, sehingga menciptakan lingkunga belajar yang melibatkan siswa secara menyeluruh. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 103 Tahun 2003 mengatakan bahwa:

Rncangan Persiapan Pembelajaran (RPP) adalah rencana pembelajaran yang dikembangkansecara rinci dari suatu materi pokok atau teme tertentu yang mengacu pada silabus yang meliputi mata pelajaran, materi pokok, alokasi waktu, tujuan pembelajaran, metode pembelajaran, media, alat dan narasumber serta penilaian.

Rancangan Program Pembelajaran merupakan beberapa penggalangan kegiatan yang perlu diterapkan oleh guru atau instruktur pada setiap pertemuan dengan jelas tindakan yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan kompetensi dan tindakan lanjutan setelah pertemuan atau waktu pembelajaran selesai.

**c**. **Evaluasi Penyelenggaraan**

Evaluasi selalu berhubungan dengan pengambilan keputusan, karena hasil evaluasi merupakan suatu landasan untuk menilai suatu program pembeajaran dan memutuskan apakah program tersebut dapat diteruskan,atau masih perlu diperbaiki lagi. Untuk itu perlu dikumpulkan bermacam-macam data dan informasi, bahkan kadang-kadang perlu disusun suatu program pembelajaran lain yang bersifat kompetitif sebagai bahan perbandingan.

Sudjana (2010:89) menyatakan bahwa Evaluasi sebagai proses untuk menentukan tingkat pencapaian tujuan-tujuan instruksional suatu program. Pendekatan yang dilakukan di sini mencakup :

a)Formulasi tujuan umum sesuai dengan analisis kebutuhan peserta latih, masyarakat, dan materi peserta diklat serta rambu-rambu tujuan yaitu psikologi belajar dan filsafat diklat; (b) Tujuan umum ini ditransfortasikan ke dalam tujuan khusus yang dapat diukur; (c) Penentuan situasi di mana peserta latih dapat memperlihatkan tingkahlaku yang dinyatakan didalam tujuan; (d) Pembuatan instrumen untuk mengukur tingkahlaku tersebut. Instrumen ini harus memenuhi syarat-syarat objektifitas, realibitas dan validitas; (e) Pemakaian instrument sebelum dan setelah perlakuan/program untuk melihat perubahan tingkah laku peserta latih; (f) Analisis hasil untuk menentukan adanya bagian-bagian yang kuat/kurang di dalam program instruksional. Tujuan yang tercapai menyatakan keberhasilan program, sedangkan tujuan yang belum tercapai menunjukkan adanya kelemahan-kelemahan; (g) Pembuatan modifikasi yang memadai di dalam program .

Dalam suatu aktivitas instruksional, evaluasi hasil belajar adalah merupakan kegiatan yang sangat penting. Proses penilaian yang dilakukan secara terus menerus. Maksudnya, untuk mengetahui perubahan tingkah laku peserta latih baik dilhat dari segi pengetahuannya, sikap maupun segi keterampilannya. Evaluasi digunakan sebagai landasan pengambilan bermacam – macam keputusan seperti seleksi dan penempatan peserta latih, perbaikan sistem instruksional yang digunakan, pengembangan kurikulum, bahkan juga penentuan akuntabilitas suatum lembaga diklat. Dalam ruang lingkup yang lebih sempit.

Grondlund (1990:21) menyatakan bahwa “tujuan utama evaluasi hasil belajar adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana peserta latih telah menguasai tujuan – tujuan belajar yang telah ditetapkan serta mendiagnosis kesulitan belajar peserta latih”.

Adapun fungsi penilaian terdiri atas : (1) Fungsi formatif: Penilaian formatif diberikan untuk satu program tertentu. Seperti pada setiap kegiatan proses belajar mengajar. Setiap uraian selalu diakhiri oleh penilaian, antara lain oleh tugas–tugas menjawab pertanyaan. Maksudnya, untuk segera mengetahui kelemahan–kelemahan pengetahuan yang dimiliki, dengan demikian muncul usaha umpan balik untuk memperbaiki kelemahan itu. (2) Fungsi sumatif: Penilaian sumatif diberikan untuk beberapa program tertentu. Seperti pada aktivitas instruksional, bahwa nanti setelah semua peserta diklat diberikan maka peserta diklat akan di akhiri dengan penilaian. Untuk mengungkapkan hasil pembelajaran secara menyeluruh, maka penilaian itu harus dilakukan secara komprehensif, artinya : (1) Isi penilaian harus mencakup 3 (tiga ) aspek tingkah laku, yaitu aspek kognitif, afektif, dan psikomotor ; (2) Semua isi peserta latih yang telah diberikan harus terungkap dalam penilaian, artinya harus dapat ditanyakan kepada peserta latih, dengan perkataan lain bahwa semua materi kuliah dapat ditanyakan dalam tes; (3) Alat penilaiannya harus lengkap, artinya penggunaan alat penilaian itu tidak terbatas pada satu jenis alat saja.

Di dalam penilaian, pelatih/instruktur harus memahami prinsip–prinsip penilaian sebagai kaidah pokok dalam penyelenggaraan penilaian. Prinsip penilaian itu adalah : (1) bahwa tes itu harus sesuai dengan tujuan pengajaran, artinya jika kita membuat tes maka tes itu merupakan hasil penjabaran dari tujuan pengajaran, (2) Tes harus mengukur materi yang mewakili dari hasil belajar danbahan–bahan yang tercakup dalam pengajaran. Artinya tes itu harus mengukur tujuan instruksional yang telah dirumuskan dengan meteri yang cocok dengan tujuan itu, (3) Tes harus direncanakan dengan matang, dibuat sedemikian rupa isi pertanyaan dan susunan kalimatnya baik. Hal ini dimaksudkan untuk menambah ketajaman uraian isi tujuan pengajaran dan pokok – pokok bahasan yang akan diujikan, (4) Tes harus juga disusun untuk memperbaiki kualitas belajar pesertalatih. Dengan perkataan lain bahwa tes harus dapat memberi peluang untuk megukur kelemahan–kelemahan dan kelebihan–kelebihan proses belajar peserta latih, (5) Tes harus dibuat dengan daya kepercayaan yang tinggi, artinya tes itu memiliki ketetapan hasil jika tes diujikan pada berbagai waktu responden, (6) Item–Item tes harus memiliki daya pembeda yang baik dan derajat kesukaran yang baik pula, maka ietm tes harus diuji cobakan dulu, kemudian itemnya dianalisis menurut rumus–rumus tertentu. Sebelum mengadakan tujuan dalam rangka mengukur hasil belajar, pelatih/instruktur harus terlebih dahulu menyusun suatu kisi–kisi *( blueprint )* sebagai jaminan bahwa apa yang dujikan memang mengukur tujuan–tujuan instruksional yang telah ditentukan- sebelumnya. Di samping itu kisi–kisi ini juga dipakai untuk menentukanbagian–bagian atau topik yang akan diujikan serta pembobotannya.

Evaluasi penting dilaksanakan guna mengetahui apakah program tersebut layak dilanjutkan atau dikembangkan atau juga diberhentikan. Evaluasi dalam Penyelenggaraan kecakapan hidup ini mencoba menggali tentang output dan autcame yang didapatkan dari sasaran penyelenggaraan ini, selanjutnya Sudjana (2010:89) menyatakan bahwa :

1) Keluaran (Output) adalah lulusan program pendidikan luar sekolah. Keluaran yang dievalusi adalah kuantitas dan kualitas lulusan program setelah mengalami proses pembelajaran

2) Pengaruh (Outcame) adalah dampak yang dialami peserta didik atau lulusan setelah memperolrh dukungan dari masukan lain, pengaruh ini dapat diukur dalam aspek peningkatan taraf atau kesejahtraan hidup dengan indicator pemilikan pekerjaan, atau usaha, pendapatan, kesehatan, pendidikan penampilan diri dan sebagainbya.

1. **Kerangka Pikir**

Upaya memperbaiki dan meningkatkan mutu pendidikan seakan tidak akan pernah berhenti, banyak agenda reformasi yang telah, sedang dan akan dilaksanakan. Beragam program inovatif ikut serta memeriahkan reformasi pendidikan.

Pendidikan kecakapan hidup dalam pendidikan nonformal adalah merupakan upaya untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan dan kemampuan yang memungkinkan warga belajar dapat hidup mandiri.

Penyelenggaraan pendidikan kecakapan hidup (*life skills*) yang diarahkan pada upaya pengentasan kemiskinan dan upaya memecahkan masalah pengangguran, oleh karena itu pemilihan keterampilan yang akan dipelajari oleh warga belajar didasarkan atas kebutuhan masyarakat, potensi lokal dan kebutuhan pasar, sehingga diharapkan akan memberikan manfaat yang positif bagi warga belajar, masyarakat sekitar dan pemerintah.

Salah satu bentuk pendidikan kecakapan hidup adalah program kursus dan pelatihan seperti yang dilaksanakan oleh yayasana kesarpati kota Makassar. Dalam pelaksanaannya ada beberapa tahapan yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan pendidikan kecakapan hidup.

Lebih lanjut kerangka pikir dapat digambarkan sebagai berikut :

Penyelenggaraan pendidikan kecakapan hidup

Pelaksanaan Program

Perencanaan

Evaluasi Program

1. Output
2. Outcame
3. Kurikulum
4. Silabus
5. RPP
6. Identifikasi Kebutuhan
7. Desain Penyelenggaraan

Hasil Penyelenggaraan

Gambar 2.2 Kerangka Pikir Penyelenggaraan Pendidikan Kecakapan Hidup pada Lembaga Kursus dan Pelatihan ( Studi Kasus Pada YPA Handayani ) Kota Makassar